

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dilihat dari segi jumlah unit usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB (Rismawandi et al., 2022). Berdasarkan data dari Kementerian UMKM RI per Desember 2024 Indonesia memiliki 65,5 juta unit usaha mikro yang berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB Indonesia dan 97% berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja Indonesia. Namun, dengan kontribusi tersebut wakil menteri UMKM RI pada acara PMII Economic Forum 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 43,1% UMKM masih membutuhkan kredit untuk ekspansi dan peningkatan produktivitas usaha. Selain itu, wakil menteri UMKM RI juga mengungkapkan sekitar 69,5% UMKM belum bisa mengakses kredit perbankan.

Pemerintah Indonesia dan lembaga perbankan telah memberikan kemudahan bagi sektor UMKM untuk mendapatkan tambahan modal dengan pengajuan kredit (Pratama, 2022). Informasi akuntansi yang akuntabel dan transparan dapat mempermudah para pelaku usaha UMKM dalam mengajukan pinjaman modal atau pendanaan (Prajanto & Septriana, 2018). Sehingga, UMKM dituntut untuk memiliki laporan keuangan atau melakukan pembukuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman modal atau pendanaan dari pihak bank (Hamongsina et al., 2022). Namun, pada pelaksanaannya pencatatan laporan keuangan atau pembukuan masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, banyak pelaku UMKM yang masih tidak memahami bagaimana menyusun laporan keuangan yang akurat serta relevan, sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan UMKM (Anggraini et al., 2022). Artinya, pelaku UMKM masih belum optimal dalam memanfaatkan pengajuan kredit yang disediakan oleh perbankan (Pratama, 2022).

Pelaksanaan pencatatan laporan keuangan atau pembukuan masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM karena terbatasnya wawasan dan keterampilan bidang akuntansi, sehingga mereka menganggap pencatatan tersebut bukanlah hal penting (Adryant & Rita, 2021). Saat ini, kebanyakan UMKM melakukan pencatatan keuangan usahanya masih secara sederhana hanya meliputi jumlah pendapatan yang diterima, jumlah modal yang dikeluarkan, jumlah piutang/utang, bahkan sejumlah pelaku UMKM masih menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

Oleh karena itu, pada tahun 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) merumuskan dan menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) guna mendukung pertumbuhan UMKM dan memudahkan pemilik UMKM dalam menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Standar tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 dan dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan seperti UMKM. Dalam SAK EMKM laporan keuangan terdiri dari 3 penyusunan yang disajikan secara sederhana memuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Tujuan dari SAK EMKM adalah memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian, pelaku UMKM akan lebih mudah mengembangkan dan mengoptimalkan pendapatan usahanya.

Akan tetapi, meskipun SAK EMKM ini sudah disajikan secara sederhana, implementasi SAK EMKM tidak serta merta memperoleh respon positif secara langsung dari pelaku UMKM, bahkan tidak sedikit pelaku UMKM masih belum mengimplementasikannya. Salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan UMKM mengimplementasikan SAK EMKM guna menyajikan laporan keuangan yang akurat dan relevan yaitu kualitas SDM yang dimilikinya. Penelitian Juniawati & Efiyenti (2022) menjelaskan bahwa SDM yang berkualitas mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penerapan SAK EMKM. Kemudian penelitian Haryeni & Budiantara (2023) menjelaskan bahwa pelaku UMKM

dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang cukup umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip akuntansi, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain itu, persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan juga turut andil dalam memengaruhi implementasi SAK EMKM pada praktik penyusunan laporan keuangan. Penelitian Juniawati & Efiyenti (2022) menyebutkan persepsi yang kuat dari pelaku UMKM tentang pentingnya laporan keuangan dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Sehingga, persepsi yang positif akan membentuk perspektif baru pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan yang sebelumnya dianggap sulit menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan (Rismawandi et al., 2022 dalam Badria & Diana, 2018). Sehingga pelaku UMKM termotivasi untuk lebih disiplin dalam menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM (Rismawandi et al., 2022).

Selanjutnya, sosialisasi SAK EMKM oleh pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan juga memberikan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam serta mengedukasi pelaku UMKM mengenai manfaat yang diperoleh melalui penerapan SAK EMKM dalam penyusunan atau pencatatan laporan keuangan. Dengan begitu, sosialisasi yang baik akan memperkuat pengaruh kualitas SDM dan persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan. Penelitian Andari et al. (2022) menunjukkan hasil sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Temuan dalam penelitian ini selaras dengan hasil yang diperoleh Mutiari & Yudiantara (2021) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi memiliki dampak positif terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Akan tetapi, sosialisasi yang monoton dan tanpa pendampingan juga

dapat menurunkan efektivitas dari sosialisasi itu sendiri (Sinta Dewi & Budiantara, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang dirancang secara sistematis, berkelanjutan, dan disertai pendampingan agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga mampu memahami dan menerapkan SAK EMKM secara konsisten dalam pengelolaan keuangan usahanya.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan sebuah provinsi yang didalamnya terdapat lima kabupaten atau kota, satu diantaranya yaitu Kabupaten Bantul yang merupakan daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul per Desember 2024, tercatat 95.455 unit UMKM terdaftar dan tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa hingga industri rumah tangga.

Berikut ini data jumlah UMKM yang tercatat di Kabupaten Bantul menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Kab. Bantul Tahun 2024

DAFTAR UMKM	TOTAL
Usaha Mikro	93.692
Usaha Kecil	1.693
Usaha Menengah	70
Total keseluruhan	95.455

Sumber: DKUKMPP Kabupaten Bantul

Tabel 1.1 diatas memberikan gambaran jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bantul, DIY yaitu sebanyak 95.455 UMKM yang terdiri atas 93.692 usaha mikro, 1.693 usaha kecil, dan 70 usaha menengah. Dalam mendukung perkembangan UMKM tersebut, akses pembiayaan menjadi faktor krusial. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berfungsi sebagai salah satu

alternatif pembiayaan yang sangat membantu UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan sumber berita yang dilansir dari KRjogja.com Kanwil DJPb DIY dalam wawancaranya menyebutkan per 31 Juli 2024 di Kabupaten Bantul realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp921,24 miliar dan menjangkau sebanyak 16.513 debitur. Untuk memperoleh permodalan yang bersumber dari KUR, pelaku UMKM diminta untuk menyajikan laporan keuangan secara layak dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Berkaitan dengan implementasi SAK EMKM dalam penyusunan atau pencatatan laporan keuangan sebelumnya penulis telah melakukan survei lapangan pada february 2025 terhadap beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Adapun informasi yang diperoleh yaitu mayoritas pelaku UMKM belum melaksanakan penyusunan atau pencatatan laporan keuangan mengikuti SAK EMKM meskipun UMKM di Kabupten Bantul sudah memperoleh sosialisasi dari lembaga terkait. Hal ini dikarenakan sosialisasi penyusunan atau pencatatan laporan keuangan yang diberikan bersifat tidak berkala dan *sporadis*. Sehingga, hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya standar akuntansi serta minimnya penerapan yang konsisten dalam pencatatan laporan keuangan mereka, padahal penyusunan laporan keuangan yang baik dan akurat sangat penting untuk mengakses pembiayaan atau pinjaman modal seperti KUR. Adapun penyusunan atau pencatatan yang dilakukan UMKM dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan pencatatan Laporan Keuangan UMKM

Laporan Keuangan UMKM saat ini	Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM
Buku catatan omzet atau penjualan	Laporan keuangan dicatat dengan sistem akrual basis. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Mengacu pada permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis beberapa aspek yang mendorong pemilik UMKM belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyajikan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan usahanya. Adapun beberapa aspek yang dianalisis meliputi kualitas SDM, persepsi pelaku UMKM, serta sosialisasi SAK EMKM yang berperan sebagai variabel moderasi.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh secara signifikan pada penyusunan dan penerapan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, seperti yang ditemukan oleh Andari et al. (2022) dan Rismawandi et al. (2022). Sedangkan Wulandari & Arza (2022) menyatakan bahwa kualitas SDM tidak menunjukkan pengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Kemudian, penelitian Rismawandi et al. (2022) dan Oyi et al. (2023) membahas tentang persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM menyebutkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sinta Dewi & Budiantara (2023) yang menyebutkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan, mengindikasikan bahwa data empiris yang diperoleh dari studi-studi tersebut tidak menunjukkan pola yang seragam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Kualitas SDM dan Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM dengan Moderasi Sosialisasi SAK EMKM”**. Perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu dalam topik yang serupa yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel moderasi, yaitu sosialisasi SAK EMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
2. Apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
3. Apakah sosialisasi SAK EMKM mampu memoderasi dan memperkuat kualitas SDM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?
4. Apakah sosialisasi SAK EMKM mampu memoderasi dan memperkuat persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah kualitas SDM berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
2. Mengetahui apakah persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
3. Mengetahui apakah sosialisasi SAK EMKM mampu memoderasi dan memperkuat kualitas SDM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
4. Mengetahui apakah sosialisasi SAK EMKM mampu memoderasi dan memperkuat persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang relevan serta memberikan manfaat dan wawasan bagi kemajuan ilmu akuntansi, khususnya dalam implementasi SAK EMKM untuk keberlanjutan UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

a) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Sehingga, pelaku UMKM di Kabupaten Bantul dapat memahami lebih dalam tentang manfaat implementasi SAK EMKM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan mereka.

b) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Penelitian ini memberikan informasi yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh lembaga terkait serta menjadi dasar untuk merancang kebijakan tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang telah diberlakukan secara resmi, sehingga kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran.

c) Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas variabel ataupun topik yang relevan dengan peneliti.

3. Manfaat Sosial

Penelitian harapannya dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar, sehingga memperkuat posisi UMKM dalam memperoleh pembiayaan atau menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga keuangan atau pemerintah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis beberapa aspek yang mendorong pemilik UMKM belum mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyajikan pencatatan atau penyusunan laporan keuangan. Adapun beberapa aspek yang dianalisis meliputi kualitas SDM dan persepsi pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM, dengan memperhatikan sosialisasi SAK EMKM sebagai variabel moderasi.

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan juli tahun 2025 dan akan difokuskan hanya pada UMKM yang tercatat dan terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul, DIY.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA